

# STRATEGI AMERIKA SERIKAT MENGGANDENG NEGARA KAWASAN ASIA PASIFIK BEGABUNG KE *INDO PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK* (IPEF)

Oleh : Sri Wahyuni Tarigan

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.IntRel

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*This research analyzed the Indo-Pacific Strategy of U.S to encourage Asia Pacific countries to join Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) partnership. IPEF is an economic framework initiated by Joe Biden's administration that seeks to advance discussion about crucial economic issues such as trade, supply chain, clean economy and fair economy.*

*This research used a neorealism perspective to explain that countries tend to compete for power in anarchic international system where there is no highest authority that regulates the behaviors of countries in international relations. Theory used in this research is institutional balancing in which countries take advantages of the domination of multilateral institutions to give pressure and threaten other countries so as to create security. The method used in this research is qualitative method with document analysis technique which was cited from books, journal article, or websites and other references that are relevant.*

*The result of this research is that the U.S applied loose rules for countries who had wanted to join IPEF membership. Those Loose rules mean that all members have freedom to choose their commitment under one or more pillars of IPEF that align with their national interests without any requirement to be bound and participate in all cooperation under those four existing pillars.*

*Keywords: U.S, IPEF, Indo-Pacific Policy, Tiongkok*

## PENDAHULUAN

Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang secara terminologi ialah gambaran dari negara-negara di Asia dan Pasifik dengan batasan geografis yang dimulai dari Samudera Hindia hingga Samudera Pasifik, benua Asia dan Australia serta negara-negara yang teritorinya berdekatan seperti Jepang, Korea Selatan, India, AS, dan Kanada.<sup>1</sup> Pertemuan dua samudera menunjukkan adanya dinamika kebebasan dan kemakmuran yang dipengaruhi oleh konstruksi maritim dibandingkan dengan konstruksi kontinental sehingga negara-negara yang terus terlibat dalam konsep Asia Pasifik itu secara geopolitik akan terus bertambah seiring dengan kepentingan masing-masing negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan hitungan angka, kawasan Asia Pasifik kini telah menjadi kawasan dengan cakupan 60% PDB global dengan jumlah populasi kaum muda mencapai 58% secara global dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 2/3 ekonomi global. Kawasan ini menyumbang lebih pendapatan sebesar 900 miliar dolar melalui penanaman modal asing bagi AS

serta membantu lebih dari 3 juta lapangan pekerjaan bagi penduduk AS.<sup>3</sup> Kawasan ini juga berbatasan langsung dengan pantai Timur AS sehingga penting bagi AS untuk menjaga pengaruh dan menegaskan kembali kehadirannya di kawasan Asia Pasifik karena berkaitan dengan kepentingan negaranya.<sup>4</sup> Kondisi kedekatan tersebut juga dimanfaatkan oleh AS untuk membangun interaksi multilateral yang berguna bagi kepentingan nasionalnya yakni menghasilkan keseimbangan ekonomi.

Arti penting kawasan Asia Pasifik bagi AS sendiri sudah dapat dilihat ketika Perang Dingin yang mana AS melakukan kebijakan membangun pangkalan militer di beberapa negara seperti Filipina, Thailand dan Singapura.<sup>5</sup> Namun intensitas politik luar negeri AS di kawasan ini mengalami penurunan setelah pergeseran arah kebijakan luar negeri AS ke wilayah Timur Tengah yang kala itu sedang mengalami konflik dengan kelompok terorisme sehingga kondisi tersebut dijadikan landasan pertimbangan bahwa kondisi kawasan Asia Pasifik relatif

---

<sup>1</sup> “Kunjungan Kerja Panitia Kerja Indo-Pasifik Proyekti Kerja Sama Indonesia-Pasifik 2022: Perspektif Parlemen,” DPR RI, diakses pada 28 November 2022, <https://www.dpr.go.id>.

<sup>2</sup> Pradipta Nindyan Saputra, Sudirman Arfin, “Pengembangan Konsep “Indo-Pasifik”: Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia di Kawasan Melalui ASEAN,” *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6, No. 2, (2020): 215

---

<sup>3</sup> The White House, “Strategi Indo-Pasifik”, modifikasi Februari 2022, diakses pada 28 November 2022, [https://id.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/72/U.S.-Indo-Pasific-Strategy\\_id.pdf](https://id.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/72/U.S.-Indo-Pasific-Strategy_id.pdf).

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Suwanti Sari dan Yanyan Mochamad Yani, “Revitalisasi Hubungan Amerika Serikat di Asia Pasifik,” *Jurnal Dinamika Global*, VOL. 2, No. 2, (2017): 6

stabil dan aman juga tidak ada konflik yang akan mengganggu kepentingan-kepentingan AS di kawasan.<sup>6</sup>

AS yang saat itu fokus pada kawasan Timur Tengah untuk kebijakan *Global War on Terrorism* tidak terlalu mengikuti perkembangan kawasan Asia Pasifik yang berkembang pesat akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Di saat yang sama, Tiongkok yang dikatakan sebagai negara *rising power* semakin percaya diri menjadi negara paling kuat di kawasan Asia Pasifik karena pertumbuhan ekonomi yang pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan yang pesat. Akibatnya Tiongkok menjadi negara pesaing terkuat AS di kawasan Asia Pasifik dan berpotensi untuk menyingkirkan AS dari aktivitas politik, ekonomi maupun militer di kawasan tersebut. Hal itulah yang menjadi landasan bagi Barack Obama sebagai presiden setelah George Bush untuk melakukan strategi *rebalancing* untuk ‘kembali’ ke Asia Pasifik.

*Rebalancing Strategi* yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik melalui penguatan kerja sama dan meningkatkan hubungan negara-negara kawasan yang mencakup aspek ekonomi,

militer dan diplomasi.<sup>7</sup> Melalui perwujudan strategi tersebut ingin menunjukkan bahwa Asia Pasifik bukan merupakan kawasan yang ditinggalkan atau tidak diperhatikan oleh AS bukan pula kawasan yang tidak penting, juga bahwa AS akan terus berkomitmen dalam menjaga dan memajukan kawasan dan tidak pernah menarik diri dari dinamika hubungan internasional kawasan.

Strategi yang begitu ambisius tersebut sayangnya dinilai terlalu sulit untuk dilakukan dan bahwa banyak dari poin-poin strategi Kebijakan Indo-Pasifik saat itu tidak berhasil kecuali *Trans Pacific Partnership* (TPP). Kemitraan TPP AS kala itu merupakan kemitraan terbesar AS di Asia Pasifik pada masa pemerintahan Obama. Namun, strategi kemitraan tersebut pada masa pemerintahan Donald Trump mengalami perubahan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan latar belakang dan kebijakan politik dengan pemerintahan sebelumnya. AS kemudian banyak menarik diri dari perjanjian-perjanjian kerja sama dan menciptakan kebijakan yang isolatif. Pada puncaknya AS menarik diri dari keanggotaannya di TPP sebagai perjanjian dagang terbesar di

---

<sup>7</sup> Ufaira Nadhifa, “External Balancing terhadap Pivot to Asia Amerika Serikat: Alasan Tiongkok Menerima India Sebagai Anggota Shanghai Cooperation Organization Tahun 2015,” diakses pada 28 November 2022, [https://repository.unair.ac.id/69716/3/JURNAL\\_Fis.HI.14%2018%20Mis%20e.pdf](https://repository.unair.ac.id/69716/3/JURNAL_Fis.HI.14%2018%20Mis%20e.pdf)

---

<sup>6</sup> Ibid

Asia Pasifik karena dianggap menghambat sektor manufaktur AS.<sup>8</sup> Meskipun keputusan tersebut berdampak positif terhadap perlindungan dan peningkatan pendapatan tenaga kerja, namun keluarnya AS dari keanggotaan TPP berdampak negatif terhadap menurunnya kredibilitas AS di kawasan Asia Pasifik yang secara destruktif menghancurkan rantai persaingan firma-firma AS yang sudah terbentuk sehingga kepemimpinan ekonomi AS di kawasan ikut menurun.<sup>9</sup>

Kondisi tersebut disadari Joe Biden, presiden AS setelah Trump, sebagai kelemahan bagi AS sehingga pada periode pemerintahannya Biden melakukan penguatan kembali pengaruh AS melalui pembentukan sebuah kerja sama ekonomi komprehensif bernama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang dibentuk pada 23 Mei 2022 di Tokyo, Jepang. Kerangka kerja sama ini memiliki empat pilar yakni Perdagangan (*Trade*), Rantai Pasok (*Supply Chain*), Ekonomi Bersih (*Clean Economy*), dan Ekonomi Adil (*Fair Economy*). Hingga saat ini IPEF telah memiliki 14 negara anggota yang merepresentasikan 40% ekonomi global,

<sup>8</sup> Angga Rizky, "Kepentingan Amerika Serikat Keluar dari Trans Pacific Partnership di Masa Pemerintahan Donald Trump," *JOM FISIP*, Vol. 5, (Juni 2018): 3.

<sup>9</sup> Christofora Adeline, "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Donald Trump Melakukan Renegosiasi Keterlibatan AS dalam Transpacific Partnership (TPP)," diakses pada 28 November 2022, <https://repository.unair.ac.id>

28% perdagangan barang dan jasa dunia serta 60% dari total penduduk dunia.<sup>10</sup> Anggota IPEF tersebut ialah AS, Indonesia, Fiji, Singapura, Jepang, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Singapura, Australia, Korea Selatan, Malaysia dan Brunei Darussalam.

IPEF yang pertama kali diperkenalkan pada *East Asia Summit* (EAS) 2022 oleh presiden Biden menjadi langkah awal bagi AS untuk menunjukkan ketertarikan dalam bekerja sama dengan negara maju maupun berkembang di kawasan Asia Pasifik dan menggandeng mereka untuk mencapai tujuan menciptakan pembangunan ekonomi digital, kenaikan investasi, pemanfaatan kerja, ekonomi tangguh dan pembangunan berkelanjutan serta kenaikan daya saing untuk mendukung pertumbuhan dan mencapai kemakmuran negara mitra.<sup>11</sup> Dengan memanfaatkan poin ekonomi

<sup>10</sup> "IPEF Ministerial Meeting Resmi Ditutup, Pertemuan Lanjutan Segera Dilakukan untuk Mendorong Manfaat Nyata bagi Indonesia dan Kawasan Indo-Pasifik," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses pada 22 November 2022, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4525/ipef-ministerial-meeting-resmi-ditutup-pertemuan-lanjutan-segera-dilakukan-untuk-mendorong-manfaat-nyata-bagi-indonesia-dan-kawasan-indo-pasifik#:~:text=IPEF%20Ministerial%20Meeting%20Resmi%20Ditutup,Koordinator%20Bidang%20Perekonomian%20Republik%20Indonesia>

<sup>11</sup> "Pernyataan Menteri terkait Empat Pilar IPEF: Perdagangan; Rantai Pasokan; Ekonomi Bersih; dan Ekonomi Adil," Kedubes AS di Indonesia, diakses pada 13 November 2022, <https://id.usembassy.gov/id/pernyataan-menteri-terkait-empat-pilar-ipef-perdagangan-rantai-pasokan-ekonomi-bersih-dan-ekonomi-adil/>

inklusif yang mengikutsertakan perusahaan-perusahaan di dalam negeri memberikan nilai tambah bagi kemudahan AS berhasil menggandeng negara-negara mitra IPEF.

Namun, IPEF yang terbentuk akibat adanya rivalitas antara AS dan Tiongkok harus dibuat semenarik mungkin karena IPEF berbeda dengan kerja sama ekonomi tradisional lainnya. Perbedaan itu terletak pada akses pasar dan pengurangan tarif masuk yang tidak dibahas dalam negosiasi kerja sama yang mana menjadikan IPEF berbeda dengan kerja sama perdagangan lainnya. IPEF juga tidak merupakan perjanjian perdagangan bebas tradisional melainkan kerja sama ekonomi yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi krusial kawasan dan membentuk kebijakan serta aturan mengenai permasalahan tersebut. Ketiadaan poin akses pasar dan pengurangan tarif masuk barang impor tersebut mengakibatkan IPEF dianggap tidak menarik dan kurang memberikan keuntungan. Di tengah hal tersebut juga, AS menyadari bahwa persaingan ekonomi dan politik mereka di kawasan tidak bisa menjadi alasan negara-negara kawasan memihak AS mengingat negara-negara

tersebut tidak mau terlihat memihak baik antara AS maupun Tiongkok.<sup>12</sup>

Ketidakberpihakan tersebut terlihat melalui keanggotaan negara-negara kawasan yang lebih dulu sudah ada di *Regional Comprehensive Partnership* (RCEP). Perjanjian perdagangan bebas RCEP yang dipimpin oleh Tiongkok memiliki anggota yang sebagian besar merupakan anggota IPEF juga. Anggota memiliki anggota yang sebagian besar merupakan anggota IPEF juga. Anggota RCEP adalah 10 negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Singapura dan lima negara mitra yakni Tiongkok, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru dan Jepang.<sup>13</sup>

Keberhasilan Tiongkok tersebut harus diimbangi oleh AS untuk mengembalikan dominasinya sebagai *super power* di kawasan. Sejauh ini strategi yang dilakukan melalui pembentukan kerangka kerja sama IPEF cukup berhasil menggantikan kegagalan AS bersama TPP yang dibuktikan dengan keanggotaan IPEF yang cukup besar dan berpengaruh dibandingkan dengan TPP

---

<sup>12</sup> Minoru Nogimon, "ASEAN is reluctant to join U.S-led decoupling /de-risking strategy for China", *Jurnal JRI Research*, Vol. 02, No. 05 (2023), hal. 2

<sup>13</sup> "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)," FTA Center, diakses pada 26 Desember 2022, <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>.

dan RCEP. Hal tersebut membuktikan bahwa AS berhasil menggandeng negara-negara Asia Pasifik tanpa harus mengganggu hubungan mereka dengan Tiongkok.

## KERANGKA TEORI

### Perspektif Neorealisme

Perspektif neorealisme dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan salah satu tokohnya yakni Kenneth Waltz pada tahun 1979, ialah sebagai pespektif kontemporer yang memandang dunia sebagai apa adanya dengan kekuatan (*power*) sebagai faktor utama dalam hubungan internasional.<sup>14</sup> Neorealisme memiliki asumsi dasar bahwa sistem internasional yang anarkis dimana ketiadaan otoritas tertinggi mengharuskan negara mencari power untuk bertahan salah satunya melalui kerja sama. Berbeda dengan kelompok realisme klasik yang sangat pesimis terhadap kerja sama, kelompok neorealisme lebih terbuka dengan adanya kemungkinan negara-negara mencari akumulasi kekuatan dengan keuntungan relatif yakni melalui kerja sama.

Waltz menjelaskan bahwa kecenderungan negara-negara besar untuk menyeimbangkan kekuatannya satu sama lain akan diikuti oleh negara-negara lemah

yang akan berusaha menggabungkan dirinya dalam kerja sama dengan negara besar dengan tujuan mempertahankan otonomi maksimumnya. Kerja sama yang dibentuk bukan hanya untuk menyeimbangkan kekuatan namun juga untuk melawan ancaman bersama yang membahayakan negara atau kawasan tersebut.<sup>15</sup>

Realisme struktural memiliki pandangan yang lebih luas dibandingkan dengan realisme klasik yang hanya berfokus pada kekuatan militer. Akumulasi dari sebuah kekuatan militer adalah yang paling penting untuk mencapai *balance of power* dalam struktur internasional. Struktur hubungan internasional yang dimaksud oleh neorealisme ialah struktur yang anarkis dimana tidak adanya satu kekuasaan yang mutlak untuk mengatur negara-negara di bawah satu pemerintahan atau bisa disebut dengan prinsip pengorganisasian.<sup>16</sup>

Sistem anarkis yang terjadi dalam hubungan internasional bagi neorealisme dapat dijelaskan, berbeda dengan realisme yang mengatakan bahwa kondisi anarkis itu merupakan suatu keniscayaan dan terjadi secara alamiah mengikuti naluri manusia untuk mencapai kekuatan militer

---

<sup>14</sup> Budhi Tri Suryanti, "Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional," *Jurnal Diplomasi Pertahanan* Vol. 7, No. 1, (2021): 30.

---

<sup>15</sup> Budhi Tri Suryanti, Loc. Cit, hal. 31

<sup>16</sup> Muhammad Erza Pradana, "Neorealisme: Sebuah Pengantar Singkat," diakses pada 30 Desember 2022, <https://www.ircorner.com/neorealisme-sebuah-pengantar-singkat/>.

paling kuat. Struktur internasional juga mengakibatkan negara lemah harus berusaha melindungi diri dan memperoleh kekuatan dan negara kuat harus mempertahankan otoritasnya dikarenakan adanya persaingan antar negara yang berdampak pada kondisi anarkis itu sendiri.<sup>17</sup>

### ***Teori Balance of Power***

*Balance of Power* atau perimbangan kekuasaan yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, dalam kajian hubungan internasional melihat negara sebagai aktor utama dengan otoritas tertinggi dimana tujuan utamanya adalah bertahan hidup dalam sistem yang anarkis. Sistem yang anarkis mengharuskan negara untuk bertahan dari ancaman salah satunya dengan bekerja sama. *Balance of power* merupakan konsep penyeimbangan kekuatan dan kekuasaan oleh negara-negara yang bekerja sama meghadapi negara yang dianggap menjadi ancaman. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari perimbangan kekuatan bukanlah menjaga perdamaian atau stabilitas internasional atau meningkatkan kekuatan melainkan bertahan dalam sistem.<sup>18</sup> Dalam teori *balance of power*

negara akan melakukan *balancing* atau *bandwagoning* sebagai respon atas ancaman tersebut. Negara dengan tujuan untuk bertahan dalam sistem yang anarkis dapat menyeimbangkan kekuatan dengan rivalnya salah satunya dengan strategi kerja sama. Membentuk kerja sama bagi suatu negara berfungsi untuk menangani ancaman bersama dengan penyatuan kekuatan sehingga ada kemungkinan yang lebih besar menghadapi otoritas yang lebih kuat

Berbeda dengan *balancing* yang didefenisikan oleh Stephen Walzt sebagai perilaku penyeimbangan kekuasaan yang dilakukan oleh negara dengan negara lainnya melalui kerja sama untuk menghadapi negara besar yang dianggap sebagai ancaman bersama., *bandwagoning* mengarah kepada bergabungnya satu negara kepada negara lain yang merupakan ancaman terbesar agar meminimalisir ancaman dengan cara mengalihkannya ke negara lain.<sup>19</sup> Sejalan dengan sistem internasional yang anarkis, negara cenderung lebih menggunakan strategi *balancing* meskipun *bandwagoning* masih mungkin terjadi.

---

<sup>17</sup> Faiz Adhisastra, "Intervensi Amerika Serikat Terkait Konflik Perang Saudara di Suriah Tahun 2011-2016," (Skripsi, Universitas Riau, 2020), 10.

<sup>18</sup> Randal L. Schweller, "The Balance of Power in World Politics," diakses pada 16 Januari 2023, [https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-](https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-119;jsessionid=42CCDA0E9EE8BAD4EEC6DE2DDFFE94AE)

---

9780190228637-e-119;jsessionid=42CCDA0E9EE8BAD4EEC6DE2DDFFE94AE

<sup>19</sup> Magdalena Venasia Monita, "Respon India terhadap Strategi Belt and Initiative Road Tiongkok," (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2020), 14.

Bentuk penyeimbangan yang dilakukan oleh negara kini telah banyak mengalami pergeseran *hard power* yang terbatas pada kekuatan militer ke arah yang lebih luas yakni *soft power* yang berbentuk perilaku cenderung berkolaborasi dengan institusi multinasional. Perilaku penyeimbangan kekuasaan melalui *multinational institutions* inilah yang disebut dengan *institutional balancing*.

*Institutional balancing* adalah bentuk tekanan atau ancaman yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan bertahan dari serangan yang diwujudkan melalui pemanfaatan dan dominasi lembaga multilateral sebagai strategi sebuah negara.<sup>20</sup> Distribusi kekuasaan yang ada di kawasan mengindikasikan bahwa negara melakukan *institutional balancing* baik secara inklusif dengan cara membangun norma dan aturan untuk membatasi dan mengontrol perilaku negara lain maupun secara eksklusif dengan mengkonsolidasikan penyatuan ekonomi dan politik mereka untuk bertahan dari tekanan pihak lain.<sup>21</sup>

Konsep *institutional balancing* dalam kaitannya dengan penelitian ini berarti bahwa AS membentuk IPEF

---

<sup>20</sup> Kai He, "Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia," *European Journal of International Relations* Vol. 14, 2008: 492

<sup>21</sup> Ibid

sebagai respon terhadap dominasi Tiongkok di kawasan yang memiliki arti penting tersendiri bagi AS. Rasa tidak aman tersebut mendorong Amerika untuk menyeimbangkan kekuatan melalui kerja sama dengan IPEF sebagai institusi multinasionalnya. Strategi *balancing* tersebut sejalan dengan penjelasan di atas bahwa negara akan cenderung menggunakan akumulasi *soft power* daripada *hard power*. Hal itu dikarenakan penggunaan kekuatan militer tidak lagi relevan dengan kondisi kawasan yang sudah terbuka dengan pendekatan ekonomi dan politik.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa dokumen (*document analysis*) dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, website maupun laman resmi lainnya untuk mendapatkan data primer dan sekunder. *Document analysis* merupakan prosedur sistematis dalam penelitian yang digunakan untuk meninjau dan mengevaluasi dokumen baik cetak maupun elektronik.<sup>22</sup> Analisis dokumen peneliti gunakan untuk memperoleh makna, pemahaman dan pengetahuan mengenai judul penelitian yakni strategi Amerika

---

<sup>22</sup> Glenn Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Method Research," *Qualitative Research Journal*, Vol 9, No. 2, (2009):28.



menggandeng negara-negara Indo-Pasifik sebagai mitra kerja sama ekonomi IPEF.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Kelonggaran Pilar IPEF untuk Menggandeng Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik**

Pada pemerintahan Biden kini, untuk melaksanakan tujuan membentuk kebijakan-kebijakan yang represif bagi Tiongkok di regional Asia Pasifik, AS mengandalkan Strategi Indo Pasifik yang difokuskan pada 10 kebijakan utama yakni:<sup>23</sup>

1. Mendorong sumber daya baru ke kawasan Indo-Pasifik
2. Memimpin *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF)
3. Memperkuat deterensi (upaya pencapaian stabilitas internasional dan perdamaian dunia dengan melakukan pertahanan tanpa peperangan)
4. Memperkuat ASEAN yang berdaya dan Bersatu
5. Mendukung kebangkitan dan kepemimpinan regional India
6. Melaksanakan QUAD
7. Memperluas kerja sama AS-Jepang-ROK
8. Bekerja sama untuk membangun ketahanan di Kepulauan Pasifik

---

<sup>23</sup> The White House Op.cit

9. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

10. Mendukung perkembangan teknologi terbuka, tangguh, aman dan terpercaya.

Rencana kebijakan AS tersebut memperlihatkan bahwa IPEF merupakan satu dari dua kebijakan teratas yang hendak diwujudkan oleh AS di kawasan Asia Pasifik. IPEF menjadi ujung tombak kebijakan yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang dari kemitraan ekonomi perdagangan bebas terbesar Tiongkok di kawasan saat ini yakni RCEP. Sebagai negara mitra utama dari RCEP, Tiongkok mampu menjadi *leading force* yang memimpin negosiasi dan menjadi kekuatan pendorong utama yang memiliki tingkat ekonomi terbesar hingga 29% dari gabungan PDB anggota..

Membendung pengaruh Tiongkok, AS membutuhkan kemitraan yang juga memiliki kekuatan cukup besar untuk menyaingi RCEP di samping mempertimbangkan pandangan kelas pekerja AS yang percaya bahwa globalisasi dan perdagangan bebas akan menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan.<sup>24</sup> Gedung Putih juga menjelaskan bahwa dengan memperluas

---

<sup>24</sup> Juan Liu, dkk, "A Comparative Analysis of RCEP and IPEF from the China-U.S. Competition" *Jurnal Modern Economics & Management Forum*, Vol. 3, No. 4, (2022), hal. 281

kekuatan ekonomi AS di kawasan akan menjamin nasib pekerja, pebisnis kecil, dan petani sehingga mampu bersaing. Menjawab hal tersebut, kehadiran IPEF tidak semata sebagai kemitraan ambisius yang berusaha mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas namun juga sebagai representasi kepentingan AS di kawasan sebagai negara saingan Tiongkok dengan tetap memperhatikan kondisi domestiknya.

Merespon ‘ancaman’ tersebut, *balance of power* yang dilakukan oleh AS ialah melalui IPEF sebagai ‘senjata’ untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik di kawasan dengan mengadopsi *institutional balancing strategy* atau strategi penyeimbangan institusional dengan menggunakan dominasi intitusi multilateral internasional untuk mengakumulasikan kekuatan melawan ancaman bersama. bersama. IPEF diharapkan bisa mendominasi persaingan ekonomi dan politik agar AS bisa bertahan dari pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok yang besar di kawasan Asia Pasifik sebagaimana Kai He menjelaskan bahwa institusi multilateral (yang dalam hal ini adalah IPEF) akan menciptakan tekanan atau ancaman melalui dominasi AS atas Tiongkok.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Kai He. Loc. Cit

Dominasi yang dibutuhkan oleh AS untuk menekan Tiongkok membutuhkan dukungan sumber daya yang besar dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Untuk mengakumulasikan dominasi tersebut dan menggandeng negara-negara Asia Pasifik bergabung, IPEF harus menarik dan berbeda dari kerangka kerja sama ekonomi lainnya yang sudah ada dalam strategi kebijakan Asia Pasifik AS sebelumnya. Untuk itu strategi yang dilakukan oleh AS memperlihatkan keunikan poin yang menarik dari IPEF ialah memberikan kelonggaran aturan kerja sama ekonomi IPEF yang tidak mengikat.<sup>26</sup>

Kelonggaran aturan yang dimaksud adalah kebebasan bagi setiap anggota IPEF dalam memilih komitmen terhadap pilar-pilar IPEF dan level kerja sama yang sesuai dengan kepentingan mereka.<sup>27</sup> Negara-negara anggota tidak harus terikat dengan kerja sama yang ada di bawah semua pilar dan bisa menentukan satu bidang dan lingkup kerja sama tertentu yang menarik. Kelonggaran yang ditawarkan memungkinkan eksplorasi

---

<sup>26</sup> “Indo-Pacific Economic Framework,” U.S Department of Commerce,” diakses pada 22 Agustus 2023, <https://www.commerce.gov/ipef/indo-pacific-economic-framework>

<sup>27</sup> Mukunoki Hiroshi, ”Challenge for IPEF: Reflection of IPEF outcomes in Existing Trade Agreements” diakses pada 22 Agustus 2023, <https://www.japanpolicyforum.jp/economy/pt2022092017030112499.html>

yang fleksibel melalui penetapan target bersama sehingga hambatan untuk masuk menjadi anggota sangat rendah dan diharapkan mampu menarik lebih banyak negara partisipan.

Fleksibilitas itu juga berarti bahwa negara-negara anggota berhak dan bisa memilih tingkat komitmen mereka terhadap pilar yang dipilih apakah akan berkomitmen pada sebagian atau sepenuhnya dari poin-poin negosiasi. Hal tersebut memudahkan anggota-anggota IPEF dalam menyesuaikan kepentingan, kemampuan dan sumber daya mereka terhadap kerja sama yang tidak kaku di IPEF sehingga ada ruang untuk bernegosiasi untuk kesepakatan yang ada. Penjelasan tersebut menunjukkan IPEF sebagai kerja sama ekonomi yang terbuka dan inklusif. IPEF tidak dimaksudkan menjadi blok ekonomi perdagangan yang tertutup misalnya negara-negara berkembang dapat memilih untuk berpartisipasi dalam pilar-pilar yang berfokus pada pengembangan ekonomi seperti investasi dan rantai pasokan, negara-negara yang memiliki permasalahan terhadap ekonomi bersih dan lingkungan dapat memilih pilar ketiga, dan lain sebagainya.

Selain itu, dengan menetapkan negosiasi kerja sama terbatas pada negara yang setuju untuk berkomitmen saja, konflik kepentingan akan lebih sedikit dan

tujuan bersama lebih jelas dan mudah untuk dicapai. Aturan yang seperti ini jelas berbeda dengan perjanjian ekonomi tradisional lainnya seperti TPP atau RCEP yang rentan terhadap konflik kepentingan sehingga kebijakan dan aturan yang merupakan output negosiasi bisa dieksplorasi dan diwujudkan dengan efektif.<sup>28</sup> Meskipun demikian IPEF dinilai sebaliknya, dimana IPEF dianggap tidak memberikan keuntungan signifikan terhadap anggota karena tidak adanya keterbukaan tarif dan akses pasar yang berarti bahwa tidak ada negosiasi mengenai pajak masuk barang impor atau hambatan perdagangan seperti kuota, standar teknis atau persyaratan perizinan ekspor impor barang dan jasa. Setiap poin-poin negosiasi yang telah dipublikasi oleh anggota IPEF hingga saat ini memang tidak memasukkan pokok bahasan yang umumnya dibahas pada perjanjian perdagangan tradisional.

Mendefinisikan IPEF sebagai kerja sama ekonomi yang mengecualikan akses pasar juga tidak sepenuhnya benar karena apabila dilihat dari sudut pandang AS sebagai inisiator IPEF, justru sebaliknya AS berhasil menghadirkan kerangka kerja sama ekonomi yang memfasilitasi mereka untuk tidak membuka akses pasar namun bisa melakukan hal sebaliknya terhadap

---

<sup>28</sup> Ibid

negara-negara mitra IPEF secara tidak langsung melalui investasi langsung perusahaan-perusahaan asal AS dan aturan-aturan yang pro terhadap kelas pekerja sehingga bisa menambah daya saing ekonomi AS.<sup>29</sup>

Isu-isu yang jarang dibicarakan dalam sebuah kerja sama ekonomi berhasil diangkat oleh IPEF sebagai isu krusial dan menarik. Hal itu bisa dibuktikan dari sebagian besar negara-negara yang bergabung di IPEF merupakan negara-negara yang juga bergabung di RCEP ataupun TPP yang berarti bahwa anggota-anggota tersebut tertarik mengenai ruang lingkup kerja sama IPEF yang tidak dibahas di RCEP maupun TPP. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi AS menggandeng negara-negara Indo-Pasifik masuk ke dalam IPEF dengan menggunakan aturan kerja sama yang longgar berhasil.

## SIMPULAN

Mengembalikan pengaruh yang sempat hilang di kawasan Asia Pasifik setelah sebelumnya AS fokus pada kawasan Timur Tengah karena kebijakan GWOT, AS membentuk IPEF sebagai strategi *institutional balancing* yakni strategi yang memanfaatkan dominasi dan

pengaruh dari suatu Lembaga multilateral untuk memberikan tekanan atau ancaman terhadap lawan (Tiongkok). Di tengah keberadaan RCEP sebagai sebuah kerja sama perdagangan multilateral konvensional, AS harus menciptakan institusi yang berbeda dimana AS juga harus bisa meyakinkan negara-negara kawasan untuk bergabung dengan IPEF di tengah ketidakberpihakan mereka baik kepada AS maupun Tiongkok.

Menjawab hal tersebut maka strategi yang dilakukan AS adalah membentuk aturan kemitraan IPEF yang relatif longgar. Aturan yang longgar tersebut berarti bahwa adanya kebebasan bagi setiap negara anggota untuk berkomitmen dan menandatangani poin kerja sama yang ada pada empat pilar IPEF (Perdagangan, Rantai Pasok, Ekonomi Bersih dan Ekonomi Adil) baik pada satu dan atau semua pilar yang ada. Hal tersebut memudahkan anggota-anggota IPEF dalam menyesuaikan kepentingan, kemampuan dan sumber daya mereka terhadap kerja sama yang tidak kaku di IPEF sehingga ada ruang untuk bernegosiasi untuk kesepakatan yang ada.

AS yang membentuk IPEF berbeda dengan kemitraan ekonomi tradisional lainnya seperti RCEP dan TPP yang mana IPEF tidak memasukkan tarif masuk dan akses pasar dalam negosiasi dan kerja samanya justru menjadi salah satu poin

---

<sup>29</sup> Jayant Menon, "What Can Malaysia Expect from IPEF?" diakses pada 23 Agustus 2023, <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2023-64-what-can-malaysia-expect-from-ipef-by-jayant-menon/>

yang bisa menggandeng dan meyakinkan negara-negara kawasan untuk bergabung.

Hal itu bisa dibuktikan dari sebagian besar negara-negara yang bergabung di IPEF merupakan negara-negara yang juga bergabung di RCEP ataupun TPP yang berarti bahwa anggota-anggota tersebut tertarik mengenai ruang lingkup kerja sama IPEF yang tidak dibahas di RCEP maupun TPP. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi AS menggandeng negara-negara Indo-Pasifik masuk ke dalam IPEF dengan menggunakan aturan kerja sama yang longgar berhasil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adeline, Christofora. "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Donald Trump Melakukan Renegosiasi Keterlibatan AS dalam Transpacific Partnership (TPP)." diakses pada 28 November 2022. <https://repository.unair.ac.id>
- Adhisastra, Faiz. "Intervensi Amerika Serikat Terkait Konflik Perang Saudara di Suriah Tahun 2011-2016." Skripsi, Universitas Riau, 2020.
- Bowen, Glenn. "Document Analysis as a Qualitative Method Research." *Qualitative Research Journal*, Vol. 9, No. 2, (2009):27-28.
- DPR RI. "Kunjungan Kerja Panitia Kerja Indo-Pasifik Proyeksi Kerja Sama Indonesia-Pasifik 2022: Perspektif Parlemen." diakses pada 28 November 2022. <https://www.dpr.go.id>
- FTA Center. "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)." diakses pada 26 Desember 2022. <https://ftacenter.kemendag.go.id/re>
- gional-comprehensive-economic-partnership-rcep.
- Hiroshi, Mukunoki. "Challenge for IPEF: Reflection of IPEF outcomes in Existing Trade Agreements." diakses pada 22 Agustus 2023. <https://www.japanpolicyforum.jp/economy/pt2022092017030112499.html>
- He, Kai. "Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia." *European Journal of International Relations*, Vol. 14, 2008: 490-518
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, "Pernyataan Menteri terkait Empat Pilar IPEF: Perdagangan, Rantai Pasokan, Ekonomi Bersih, dan Ekonomi Adil." diakses pada 08 Juni 2023. <https://id.usembassy.gov/id/pernyataan-menteri-terkait-empat-pilar-ipef-perdagangan-rantai-pasokan-ekonomi-bersih-dan-ekonomi-adil/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "IPEF Ministerial Meeting Resmi Ditutup, Pertemuan Lanjutan Segera Dilakukan untuk Mendorong Manfaat Nyata bagi Indonesia dan Kawasan Indo-Pasifik." diakses pada 11 November 2022. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4525/ipef-ministerial-meeting-resmi-ditutup-pertemuan-lanjutan-segera-dilakukan-untuk-mendorong-manfaat-nyata-bagi-indonesiadankawasanindopasifik#:~:text=IPEF%20DMM%20secara%20resmi%20ditutup,menteri%20pada%20Kamis%20hingga%20Jumat%20>
- Liu, Juan dkk. "A Comparative Analysis of RCEP and IPEF from the China-U.S. Competition." *Jurnal Modern Economics & Management Forum*, Vol. 3, No. 4, (2022): 280-284.

- Menon, Jayant. "What Can Malaysia Expect from IPEF?." diakses pada 23 Agustus 2023. <https://www.iseas.edu.sg/articlescommentaries/iseas-perspective/2023-64-what-can-malaysia-expect-from-ipef-by-jayantmenon/>
- Monita, Magdalena Venasia. "Respon India terhadap Strategi Belt and Initiative Road Tiongkok." Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.
- Nogimon, Minoru. "ASEAN is reluctant to join U.S-led decoupling /de-risking strategy for China." *Jurnal JRI Research* , Vol. 02, No. 05, 2022: 1-9. Rizky, Angga. "Kepentingan Amerika Serikat Keluar dari Trans Pasific Partnership di Masa Pemerintahan Donald Trump." *JOM FISIP*, Vol. 5, (Juni 2018): 1-14.
- Pradana, Muhammad Erza. "Neorealisme: Sebuah Pengantar Singkat." Diakses pada 30 Desember 2022. <https://www.ircorner.com/neorealisme-sebuah-pengantar-singkat/>. Saputra,
- Saputra, Pradipta Nindyan dan Sudirman Arfin. "Pengembangan Konsep "Indo Pasifik": Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia di Kawasan Melalui ASEAN." *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6, No. 2, (2020): 213-223.
- Sari, Suwarti dan Yanyan Mochamad Yani. "Revitalisasi Hubungan Politik Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik." *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 02, No. 02, (2017): 4-17. The White House, "Strategi Indo-Pasifik", modifikasi Februari 2022, diakses pada 28 November 2022, [https://id.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/72/U.S.-Indo-Pasific-Strategy\\_id.pdf](https://id.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/72/U.S.-Indo-Pasific-Strategy_id.pdf).
- Schweller, Randal L. "The Balance of Power in World Politics." diakses pada 16 Januari 2023. [Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol. 7, No. 1, \(2021\): 29-36.](https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore9780190228637119;jsessionid=42CCDA0E9EE8BAD4EEC6DE2DDFFE94AESuryanti, Budhi Tri. )
- U.S Department of Commerce. "Indo-Pacific Economic Framework." diakses 22 Agustus 2023. <https://www.commerce.gov/ipef/indopacific-economic-framework>